



## Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Perdagangan Narkoba Dengan Memanfaatkan Teknologi.

<sup>1\*</sup>Askarmin Harun, <sup>2</sup>Timbul Dompok.

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau Kepulauan.

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Putera Batam.

Correspondance author: [askarmin4@gmail.com](mailto:askarmin4@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 10 Desember 2024

Revisi Akhir: 20 Desember 2024

Diterbitkan Online: 23 Desember 2024

#### KEYWORDS

*Drugs, Government, Technology.*

### KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: [askarmin4@gmail.com](mailto:askarmin4@gmail.com)

### A B S T R A C T

Drug trafficking is a serious problem that continues to threaten public security and health. The government is required to develop a more effective strategy in overcoming this problem, one of which is by utilizing technology. This research aims to evaluate the role of the BOSS (BNN One Stop Service) application as a tool to help the government in reducing drug trafficking. The research methods used include collecting primary and secondary data through literature studies, searching for various related information, as well as analyzing drug case data obtained from the BOSS application. The research results show that the BOSS application is able to increase the effectiveness of monitoring and preventing drug trafficking through integrated data collection and analysis. This application not only enables early detection of suspicious activity, but also increases public participation in anonymous reporting, thereby expanding the scope of surveillance. These findings indicate that the use of technology in the BOSS application has great potential to strengthen government efforts to tackle drug trafficking and create a safer environment.

## Pendahuluan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya penegakan hukum dan keamanan nasional. Salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia adalah maraknya peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan ekonomi bangsa. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menangani permasalahan narkoba di negeri ini.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan zat-zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan dalam fungsi tubuh serta perilaku seseorang. Narkoba dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Narkotika, seperti morfin dan heroin, umumnya digunakan untuk mengurangi rasa sakit, tetapi juga memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan. Psikotropika, seperti amfetamin dan ekstasi, dapat memengaruhi mood, persepsi, dan proses berpikir, sering kali digunakan dalam

konteks rekreasi, tetapi juga berisiko tinggi bagi kesehatan mental dan fisik.

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kerusakan fisik, gangguan mental, dan peningkatan risiko kecelakaan. Selain dampak kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi termasuk peningkatan kriminalitas, masalah keluarga, dan beban pada sistem kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mengatur penggunaan dan peredaran narkoba dengan ketat untuk melindungi masyarakat. Menurut (Hariyanto,2018) Pemberantasan narkoba menjadi salah satu fokus utama pemerintah dan lembaga terkait, dengan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Perdagangan narkoba adalah perdagangan gelap atau ilegal yang terjadi bahkan hingga tingkat global yang melibatkan pembudidayaan, pembuatan, distribusi, dan penjualan zat yang tidak sesuai dengan undang - undang larangan narkoba. (Khausar, M 2021). Melalui berbagai lembaga seperti BNN dan Kepolisian, pemerintah secara aktif memerangi peredaran gelap narkoba dan

menindak tegas para pengedarnya sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penanganan narkoba di Indonesia. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan: Golongan I (seperti heroin, kokain) yang paling berbahaya dan dilarang untuk medis, Golongan II (morfin) untuk pengobatan dengan pengawasan ketat, dan Golongan III (kodein) dengan risiko ketergantungan rendah. Undang-undang ini memberikan sanksi berat bagi pengedar, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup, sedangkan bagi pengguna lebih ditekankan pada rehabilitasi. Peredaran narkotika hanya boleh dilakukan oleh industri farmasi berizin untuk keperluan medis.

BNN dan penegak hukum diberi wewenang luas dalam penyelidikan, namun tetap dalam pengawasan. Undang-undang ini juga mengatur peran masyarakat dalam pencegahan, program rehabilitasi bagi pecandu, dan penyitaan aset hasil kejahatan narkoba untuk kepentingan negara. Intinya, UU ini menggabungkan pendekatan hukum yang tegas untuk pengedar dengan pendekatan kesehatan dan rehabilitasi untuk pengguna. Selain penegakan hukum, pemerintah juga fokus pada upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda di sekolah-

sekolah. Kampanye anti-narkoba dilakukan secara masif melalui berbagai platform media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

Dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba, pemerintah menyediakan fasilitas rehabilitasi dan bekerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan serta sosial. Program rehabilitasi ini tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tapi juga mencakup pendampingan mental dan sosial agar para korban bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Mengingat permasalahan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, pemerintah Indonesia juga aktif menjalin kerja sama internasional (Mintawati.H, 2021).

Koordinasi dilakukan dengan berbagai negara untuk memberantas jaringan narkoba internasional, termasuk pertukaran informasi dan bantuan penegakan hukum. Indonesia juga terlibat dalam berbagai konvensi internasional yang bertujuan mengendalikan peredaran narkoba global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya penegakan hukum dan keamanan nasional. Salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia adalah maraknya

peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan ekonomi bangsa-bangsa. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilansir dari Kompas.com pada Desember 2023, sepanjang tahun 2023 telah terjadi peningkatan kasus narkoba sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut laporan CNN Indonesia, kasus yang mencengangkan terjadi di Jakarta pada Oktober 2023, dimana aparat berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dengan barang bukti 200 kg sabu-sabu yang ditaksir bernilai ratusan miliar rupiah. Sementara itu, Detik.com melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023, BNN telah menggagalkan lebih dari 500 upaya penyelundupan narkoba melalui berbagai jalur, termasuk pelabuhan dan bandara internasional.

Berbagai permasalahan dalam pemberantasan narkoba masih terus dihadapi, seperti Sulitnya melacak jaringan pengedar yang menggunakan teknologi canggih, keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kurangnya sistem pengawasan yang terintegrasi, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus narkoba dan Maraknya peredaran narkoba melalui platform digital (Yunus,A.2021).

Pemanfaatan teknologi digital dalam upaya pemberantasan narkoba merupakan langkah yang tepat mengingat para pengedar narkoba juga semakin canggih dalam menggunakan teknologi untuk melancarkan aksinya. Melalui Aplikasi BOSS, pemerintah dapat melakukan pemantauan secara real-time, mengumpulkan data dan informasi secara terintegral, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba.

Dalam hal ini menguraikan lebih lanjut tentang peran strategis pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi, khususnya Aplikasi BOSS, sebagai instrumen untuk mengurangi dan mencegah perdagangan narkoba di Indonesia. Pembahasan akan mencakup berbagai aspek mulai dari latar belakang masalah, implementasi teknologi, hingga dampak dan efektivitasnya dalam upaya pemberantasan narkoba, serta rekomendasi untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis, salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital melalui pengembangan Aplikasi BOSS (BNN One Stop Service ) Aplikasi ini merupakan inovasi terkini yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap

jaringan perdagangan narkoba. Pemanfaatan teknologi digital dalam upaya pemberantasan narkoba merupakan langkah yang tepat mengingat para pengedar narkoba juga semakin canggih dalam menggunakan teknologi untuk melancarkan aksinya. Melalui Aplikasi BOSS, pemerintah dapat melakukan pemantauan secara real-time, mengumpulkan data dan informasi secara terintegral, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba.

Pendahuluan ini bertujuan menguraikan lebih lanjut tentang peran strategis pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi, khususnya Aplikasi BOSS, sebagai instrumen untuk mengurangi dan mencegah perdagangan narkoba di Indonesia. Menganalisis efektivitas aplikasi BOSS dalam mendukung kinerja pemerintah untuk mengurangi peredaran narkoba Mengidentifikasi peran teknologi dalam membantu penegak hukum melacak dan menindak jaringan narkoba, Mengevaluasi dampak implementasi aplikasi BOSS terhadap tingkat keberhasilan operasi penangkapan pengedar narkoba, Mengkaji strategi pengembangan aplikasi BOSS untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan peredaran narkoba dan

Memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.

## Literatur Review.

### a. Konsep Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga dalam kedudukannya dalam masyarakat. Sementara itu, pemerintah didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus, dan memimpin suatu negara atau daerah. Memberantas berarti menghentikan atau menumpas sesuatu yang merusak, dan korupsi adalah penyalahgunaan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan (Baharuddin, M.J. 2021).

Dengan mengacu pada definisi tersebut, peran pemerintah dalam memberantas korupsi mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai institusi yang berwenang untuk mengambil tindakan dalam mencegah, menindak, dan menghapuskan praktik korupsi di berbagai sektor negara dan masyarakat. Ini termasuk pembuatan kebijakan antikorupsi, penegakan hukum yang tegas, serta pengawasan terhadap

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

Di Indonesia lembaga yang menangani masalah tersebut sering kita kenal dengan BNN dan kepolisian. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas menangani masalah narkoba. Didirikan dengan tujuan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN memiliki berbagai fungsi penting.

Salah satunya adalah penegakan hukum, di mana BNN memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap kejahatan narkoba, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian. Selain penegakan hukum, BNN juga berfokus pada pencegahan dengan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya narkoba melalui kampanye sosialisasi, khususnya di kalangan remaja.

Di sisi lain, BNN mengelola program rehabilitasi bagi pengguna narkoba untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka serta membantu reintegrasi sosial bagi mantan pengguna. BNN juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemberantasan narkoba di tingkat nasional dan menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah lain, organisasi non-pemerintah, serta organisasi internasional untuk mengatasi

permasalahan narkoba. Pengumpulan dan analisis data terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi salah satu tugas BNN, yang bertujuan mendukung kebijakan dan program yang lebih efektif dalam penanganan masalah narkoba. Dengan berbagai peran dan fungsi ini, BNN berupaya menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, serta memberikan dukungan bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan. Sehingga peran pemerintah dalam pemberantasan narkoba sangat penting karena narkoba merupakan ancaman serius bagi masyarakat dan negara.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba, baik itu pengguna, pengedar, maupun produsen (Friskatati, H. 2024) Penindakan yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi peredaran narkoba di masyarakat. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menjalankan penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, terutama melalui sosialisasi di sekolah, kampus, dan komunitas.

Pemerintah juga bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba lintas batas, melalui pertukaran informasi,

pelatihan, dan operasi bersama (Rofiana, 2022). Fasilitas rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah bagi pengguna narkoba juga menjadi langkah penting untuk membantu pemulihan pengguna dan memutus rantai peredaran narkoba.

### **b.Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penegakan hukum.**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus-kasus kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba. Teknologi informasi memungkinkan pengawasan dan pemantauan yang lebih baik melalui CCTV dan sistem deteksi otomatis, sehingga memudahkan penegak hukum dalam mencegah dan mengungkap kejahatan dengan lebih cepat.

Teknologi juga mendukung pengumpulan dan analisis data yang lebih akurat, membantu aparat penegak hukum dalam mengenali pola-pola kejahatan dan membuat keputusan yang berdasarkan data. Sistem manajemen kasus berbasis teknologi memudahkan pengelolaan informasi dan penyimpanan bukti secara aman, yang memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara instansi penegak hukum (Djati.J.2024). Teknologi informasi juga memperluas akses masyarakat untuk

memperoleh edukasi hukum secara online, sehingga kesadaran hukum di masyarakat dapat meningkat. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum di tingkat nasional maupun internasional juga lebih mudah dilakukan berkat teknologi, yang memperkuat kemampuan pemerintah dalam menangani kejahatan lintas negara, termasuk peredaran narkoba.

Kajian teori mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum melibatkan berbagai pendekatan yang menjelaskan bagaimana teknologi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Berikut adalah beberapa teori yang relevan dalam memahami konsep ini:

#### 1. Teori Modernisasi.

Teori modernisasi berpendapat bahwa perkembangan teknologi adalah kunci untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Dalam konteks penegakan hukum, penerapan teknologi informasi seperti sistem manajemen data, analisis kriminal berbasis algoritma, dan perangkat lunak pemantauan dapat meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi kejahatan. Teori ini menunjukkan bahwa dengan mengadopsi teknologi, lembaga penegak hukum dapat berfungsi lebih efektif dan responsif

terhadap tantangan keamanan modern (Irwan.L.Y.2023).

## 2. Teori Sistem Informasi.

Teori sistem informasi, seperti yang dijelaskan oleh Laudon dan Laudon, menekankan pentingnya pengelolaan informasi dalam organisasi. Dalam penegakan hukum, teknologi informasi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang efisien, sehingga meningkatkan kemampuan lembaga untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti (Kesumadewi, A. K. 2020). Dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi, lembaga penegak hukum dapat berbagi informasi secara real-time dan meningkatkan kolaborasi antar instansi.

## 3. Teori Kriminalitas Terorganisir.

Teori ini menggarisbawahi pentingnya memahami pola-pola kejahatan dalam konteks yang lebih luas. Teknologi informasi membantu dalam analisis data untuk mengidentifikasi dan memetakan jaringan kriminal, serta mengungkap modus operandi kejahatan terorganisir (Lukman,2021). Dengan alat analisis yang canggih, penegak hukum dapat melacak aktivitas kriminal dan mengembangkan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran.

## 4. Teori Keamanan *Cyber*.

Teori keamanan siber membahas tantangan dan risiko yang muncul seiring

dengan penggunaan teknologi informasi. Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu melindungi data dan sistem mereka dari serangan siber (Paretanan, E 2021). Penegakan hukum harus menyelaraskan upaya penanganan kejahatan tradisional dengan kebutuhan untuk melindungi informasi digital, sehingga teknologi tidak hanya menjadi alat penegak hukum tetapi juga memerlukan perlindungan.

## 5. Teori Transparansi dan Akuntabilitas.

Teori ini menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan data dan informasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat menyediakan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk mengawasi kegiatan penegakan hukum. Ini dapat menciptakan tekanan sosial untuk mendorong praktik yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (Ramadhani, 2018).

## 6. Teori Inovasi Terbuka.

Teori inovasi terbuka, yang diperkenalkan oleh Henry Chesbrough, menekankan kolaborasi antara berbagai pihak dalam menciptakan solusi inovatif. Dalam konteks penegakan hukum, pemanfaatan teknologi informasi dapat melibatkan kerja sama dengan sektor swasta, universitas, dan masyarakat sipil



untuk mengembangkan alat dan sistem baru yang meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kolaborasi ini memungkinkan pengembangan solusi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### 7. Teori Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti.

Teori ini menyoroti pentingnya menggunakan data dan analisis untuk membuat keputusan yang informasional dan berbasis bukti. Dalam penegakan hukum, teknologi informasi memungkinkan aparat untuk mengumpulkan data terkait kejahatan, perilaku kriminal, dan efektivitas intervensi, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih terencana dan berdasarkan analisis yang mendalam.

Dengan pemanfaatan teori-teori ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat integritas, akuntabilitas, dan responsivitas lembaga penegak hukum terhadap dinamika kejahatan yang terus berubah.

#### Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi BOSS dalam

mengurangi perdagangan narkoba. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen akademik terkait teknologi dalam pengawasan narkoba dan efektivitas aplikasi serupa, yang diperoleh dari Google Scholar. Selain itu, data kuantitatif juga diperoleh langsung dari aplikasi BOSS, termasuk jumlah kasus yang terdeteksi, pola peredaran narkoba, tingkat pelaporan masyarakat, dan respons aparat penegak hukum.

Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi pengumpulan dan analisis data statistik yang ada dalam aplikasi BOSS untuk periode tertentu, guna mengidentifikasi pola dan tren perdagangan narkoba. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan temuan dalam dokumen akademik terkait yang dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur efektivitas aplikasi BOSS berdasarkan jumlah laporan, tingkat keberhasilan pencegahan, serta tingkat pengawasan secara keseluruhan. Hasil analisis statistik digunakan untuk memberikan gambaran objektif mengenai peran aplikasi BOSS dalam membantu pemerintah mengurangi perdagangan narkoba.

## Hasil Dan Pembahasan.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pemberantasan Narkoba Pemerintah telah mengambil langkah inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi BOSS (Badan Narkotika Nasional One Stop Service) untuk mengurangi perdagangan, pengawasan dan rehabilitasi pendidikan mengenai narkoba. Aplikasi ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap perkembangan teknologi dalam upaya pemberantasan narkoba. Fitur dan Fungsi Aplikasi BOSS memiliki beberapa fitur utama yang mendukung upaya pemberantasan narkoba:

- a. Sistem pelaporan Online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba secara anonim dan real-time.
- b. Pemetaan daerah rawan narkoba berdasarkan data yang terkumpul, membantu aparat dalam menargetkan operasi.
- c. Sistem informasi terpadu yang menghubungkan berbagai instansi penegak hukum untuk berbagi data dan informasi terkait kasus narkoba.
- d. Modul edukasi interaktif tentang bahaya narkoba untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat.

Penggunaan teknologi dalam pengawasan narkoba terbukti sangat efektif dan memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek (Oktaviani S, 2022). Dengan informasi yang diperoleh secara langsung, penegak hukum dapat merespons dengan cepat terhadap aktivitas mencurigakan. Selain itu, analisis data menjadi salah satu alat penting. Dengan memanfaatkan Big data dan analitik, pihak berwenang dapat mengidentifikasi pola dan tren penyalahgunaan narkoba.

Data yang berasal dari sumber-sumber seperti media sosial, laporan rumah sakit, dan data kepolisian dapat dianalisis untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peredaran narkoba. Teknologi juga memberikan kemudahan dalam pelaporan. Melalui aplikasi mobile dan platform online, masyarakat dapat melaporkan kegiatan narkoba secara anonim, yang meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan dan pencegahan.

Selain itu, alat deteksi narkoba berbasis kimia dan perangkat pemindai digunakan untuk mengidentifikasi narkoba di berbagai tempat, termasuk bandara, perbatasan, dan acara publik. Pendidikan dan kampanye kesadaran juga dapat dioptimalkan melalui teknologi. Media sosial, video edukatif, dan aplikasi

kesehatan digunakan untuk menjangkau masyarakat luas dan memberikan informasi mengenai bahaya narkoba.

Tak kalah pentingnya, teknologi memungkinkan kolaborasi internasional dalam memerangi peredaran narkoba. Dengan berbagi informasi tentang jaringan narkoba internasional, penegakan hukum dapat melacak dan menghentikan penyelundupan dengan lebih efektif (Gultom, 2024). Meski demikian, ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti isu privasi, biaya implementasi, kebutuhan untuk terus memperbarui dan mengamankan sistem dari ancaman siber,.

Perlunya edukasi masyarakat tentang penggunaan aplikasi secara bertanggung jawab, keterbatasan akses internet di beberapa daerah yang dapat menghambat efektivitas aplikasi dan kebutuhan pelatihan untuk pengguna teknologi tersebut. Namun, secara keseluruhan, integrasi teknologi dalam pengawasan narkoba menunjukkan hasil yang positif dan memperkuat upaya pencegahan serta penegakan hukum.

Dengan melihat data survei kepuasan penggunaan layanan aplikasi di dapatkan bahwa Sistem, mekanisme dan prosedur memperoleh skor terendah sebesar 93,75, menurut temuan pemrosesan data. Selain itu, spesifikasi produk untuk kategori fasilitas dan layanan

diberikan skor yang sama yaitu 93,75. Waktu penyelesaian, yang diberikan skor tertinggi 100 dari semua aspek layanan, dan kompetensi pelaksana, serta cara mereka menangani keluhan, rekomendasi, dan masukan, adalah tiga elemen layanan yang mendapatkan skor tertinggi.

Dengan skor SKM sebesar 98,66, pelaksanaan layanan publik Direktorat Hukum BNN secara umum mencerminkan tingkat kualitas Sangat Baik, menurut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Layanan Konsultasi Hukum yang dilakukan melalui [Boss.bnn.go.id](http://Boss.bnn.go.id) antara Januari dan Juni 2023. Ini menunjukkan bahwa kinerja penyampaian layanan publik meningkat secara bertahap antara tahun 2021 dan 2023. Untuk membuat layanan konsultasi hukum menjadi lebih baik, tim akan terus meningkatkan layanan tersebut sebagai respons terhadap masalah yang muncul (BNN, 2024).

Menurut laporan media nasional, 4.8 million orang Indonesia di antara usia 15 dan 64 tahun terpapar narkoba pada tahun 2023, menurut sumber dari National Narcotics Agency (BNN). Menurut data terbaru dari Indonesian Drugs Report 2023, yang dirilis oleh BNN RI, ada 1,150 jenis New Psychoactive Substances (NPS) yang diidentifikasi di seluruh dunia. Sementara itu, menurut Indonesian Drugs Report 2023, yang dirilis oleh BNN RI,

ada 91 (sembilan puluh satu) jenis NPS yang ditemukan di Indonesia. Menurut data yang dikumpulkan dari Research, Data, and Information Center of the National Narcotics Agency (Puslitdatin BNN), prevalensi drug abuse meningkat dari 1,80% pada tahun 2021 menjadi 1,95% pada tahun 2022.

Namun, dari 2021 hingga 2023, jumlah orang yang menggunakan narkoba turun 0,22%, atau sekitar 3,3 juta orang. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 300.000 anak-anak di negara kita telah diselamatkan dari penggunaan narkoba (Kemenhub RI, 2024). Pemanfaatan teknologi melalui aplikasi BOSS menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengadopsi pendekatan modern untuk mengatasi masalah perdagangan narkoba berdampak positif dalam akses informasi tentunya. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, aplikasi ini telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Dengan pengembangan lebih lanjut dan dukungan masyarakat, aplikasi BOSS di Indonesia.

## **Simpulan**

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi perdagangan narkoba dengan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi BOSS. Aplikasi ini merupakan inovasi

strategis yang memungkinkan pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan pemantauan peredaran narkoba secara lebih efektif dan terintegrasi. Melalui BOSS, pemerintah dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti laporan masyarakat, data kepolisian, dan data medis, untuk mengidentifikasi pola peredaran narkoba, mengantisipasi titik-titik rawan, serta merespons lebih cepat terhadap aktivitas yang mencurigakan.

Selain itu, aplikasi BOSS juga meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan dengan menyediakan fitur pelaporan anonim. Hal ini memberi peluang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba tanpa rasa takut, sehingga memperluas jangkauan dan ketepatan upaya pencegahan. Teknologi.

BOSS membantu pemerintah memperkuat kolaborasi antar lembaga penegak hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional, untuk memerangi jaringan perdagangan narkoba dengan lebih optimal. Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi melalui aplikasi BOSS memperkuat efektivitas pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka.

- Baharuddin, M. J. (2021). Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar. *Alauddin Law Development Journal*, 3(3), 591-599.
- Djati, J., Madiistriyatno, H., & Nurakhim, B. (2024). Pengaruh Kompetensi Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Manajemen Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(2).
- Friskatati, H. (2024). Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1).
- Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 33-42.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210.
- Irsan, L. Y., Musrizal, R. R. K., Dimlana, R. S., Dzaki, A., & Antoni, H. (2023). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Dan Mengatasi Peredaran Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus: Tedy Minahasa). *Yustisi*, 10(3), 40-44.
- Kesumadewi, A. K. (2020). Penerapan E-Government Di Indonesia Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 7(1), 101-116.
- Khausar, M., Harutogu, S. A., & Rofii, M. S. R. (2021). Upaya Pemerintah Turki Dalam Menyelesaikan Masalah Kejahatan Transnasional Terorganisir “Perdagangan Narkotika Psikotropika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)”. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(06), 959-972.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2(3), 405-417.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.
- Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 137-143.
- Paretanan, E., Darwis, W., Darwis, W., Barung, D. U. L., Putri, N. L., Intan, R., & Rome, M. (2021). Peran Teknologi Berbasis Gadget Dalam Memberantas Korupsi. *Prosiding Universitas Kristen Indonesia Toraja*, 1(1), 189-192.
- Ramadhani, N., & Farabi, N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016. *Journal*

Of International Relations  
Diponegoro, 5(1), 1074-1081.

Rofiana, R., & Siahaan, N. F. (2022).  
Peranan Pemerintah Dalam  
Memberantas Penyalahgunaan Dan  
Perdagangan Obat-Obatan  
Terlarang. *Legalitas: Jurnal Ilmiah  
Ilmu Hukum*, 6(2), 16-27.

Yunus, A., & Hofi, M. A. (2021).  
Formulasi Kewenangan  
Penyadapan Komisi  
Pemberantasan Korupsi Dalam  
Upaya Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi Di Indonesia.  
*Hukmy: Jurnal Hukum*, 1(1), 35-  
54.

#### **Sumber Website :**

Bnn (06, 2024) Laporan Pelaksanaan  
Survei Kepuasan Masyarakat  
(Skm) Layanan Konsultasi Hukum  
P4gn Melalui Boss.Bnn.Go.Id.  
Diakses Pada 2 November 2024,  
Dari

[https://Bnn.Go.Id/Konten/Unggahan/2024/06/Dit.-Hukum\\_Skm.Pdf](https://Bnn.Go.Id/Konten/Unggahan/2024/06/Dit.-Hukum_Skm.Pdf)

Kemhub RI ( 03.06.2024) Sosialisasi  
Asn Perhubungan Sehat, Bugar  
Dan Bersih Dari Narkoba. Diakses  
Pada 2 November 2024, Dari

<https://Kemhub.Go.Id/Post/Read/%E2%80%8bsosialisasi-Asn-Perhubungan-Sehat,-Bugar-Dan-Bersih-Dari>



# DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>

